



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SUTARTO HADI**
2. Jabatan : **REKTOR**
3. NHK : **429082**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.752.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/156 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARMASIN , HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 340 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/198 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 339.600.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.800.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
4. MOBIL, HONDA HRV SUV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 671.106.951



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.762.706.951
III. HUTANG	Rp.	97.993.468
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.664.713.483

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.